



PENYEDIAAN BASIS DATA KAWASAN PERMUKIMAN

Disampaikan pada Kegiatan:
Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah
Solo, 14 Maret 2019

OUTLINE

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Kebijakan Satu Data Indonesia
4. Basis Data Kawasan Permukiman
5. Pengelompokkan Basis Data
6. Struktur Data Minimal Kawasan Permukiman
7. Konten Data Minimal Kawasan Permukiman
8. Instrumen Pengumpulan Data
9. Pengumpulan Data Minimal
10. Alur Pengelolaan Data
11. Sistem Informasi
12. Pengumpulan Data dan Sistem Informasi
13. Arahan Penyusunan Basis Data Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah



1. LATAR BELAKANG

- Diinisiasi sejak tahun 2014 melalui UKP4, menghasilkan **Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan**.
- **Diimplementasikan** melalui SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga.
- Tujuan Satu Data Indonesia:
mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.



**SATU DATA
INDONESIA**

2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang
Nomor
1 Tahun 2011
Tentang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Pasal 16
Kewenangan Pemerintah



Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman

Pasal 17
Kewenangan Pemerintah
Provinsi



Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi

Pasal 18
Kewenangan Pemerintah
Kabupaten / Kota



Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten / kota

Ranperpres
Satu Data Indonesia
Versi ke – 17
Ketentuan Umum
Pasal 1

Data mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainya yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan

3. KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

a. Prinsip Dasar

Standar Data

Metadata Baku

Interoperabilitas/Pertukaran Data

Kode Referensi yang Sama

Satu Portal Data

DATA INDONESIA
DALAM SATU PORTAL

b. Penetapan Pembina Data



BADAN PUSAT STATISTIK

BPS sebagai Pembina Data Statistik



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BIG sebagai Pembina Data Geospasial



Pembina Data selain Data Statistik dan Data Geospasial

3. KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

c. Ketentuan-Ketentuan

Berbagi pakai Data antar lembaga dilaksanakan:

- **Tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenis** sesuai peraturan
- **Tanpa biaya.**
- Mencakup data **statistik**, data **geospasial**, dan jenis **data lainnya**.



d. Pelaksana Satu Data

A. Pelaksana di tingkat **Pemerintah Pusat**:

1. Dewan Pengarah (wadah lintas Menteri/Kepala Lembaga)
2. Tim Pelaksana (Pembina Data, Walidata K/L/I)
3. Sekretariat Satu Data Indonesia
4. Produsen Data

B. Pelaksana di tingkat **Provinsi**:

1. Tim Pelaksana:
 - a. Pembina Data Provinsi.
 - b. Walidata Provinsi.
 - c. Walidata Pembantu pada OPD Provinsi.
 - d. Walidata Kab/Kota.
2. Produsen Data Provinsi.

C. Pelaksana di tingkat **Kabupaten/Kota**:

1. Tim Pelaksana:
 - a. Pembina Data Kab/Kota.
 - b. Walidata Kab/Kota
 - c. Walidata Pembantu pada OPD Kab/Kota.
2. Produsen Data Kab/Kota.

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

STANDARDISASI DATA

TUJUAN

- a. **Menyamakan Persepsi** antar stakeholder bidang Infrastruktur permukiman mengenai Struktur Data, Isian data, dan Deskripsi Data.
- b. **Memberikan Panduan** dalam pengelolaan data bidang infrastruktur permukiman yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder baik pusat maupun daerah.
- c. **Memberikan Kemudahan** bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi (pengumpulan, pemrosesan, analisa dan pelaporan data).

MANFAAT

- a. Terelesaikannya **permasalahan heterogenitas** data meliputi tipe data, ukuran data, domain data, item data, dan tingkat detail data.
- b. **Meminimalisasi terjadinya inkonsistensi data** karena item data yang sama didefinisikan berbeda-beda
- c. Meningkatkan **pengembangan database**
- d. Mempermudah **terwujudnya integrasi** antar data dan aplikasi.

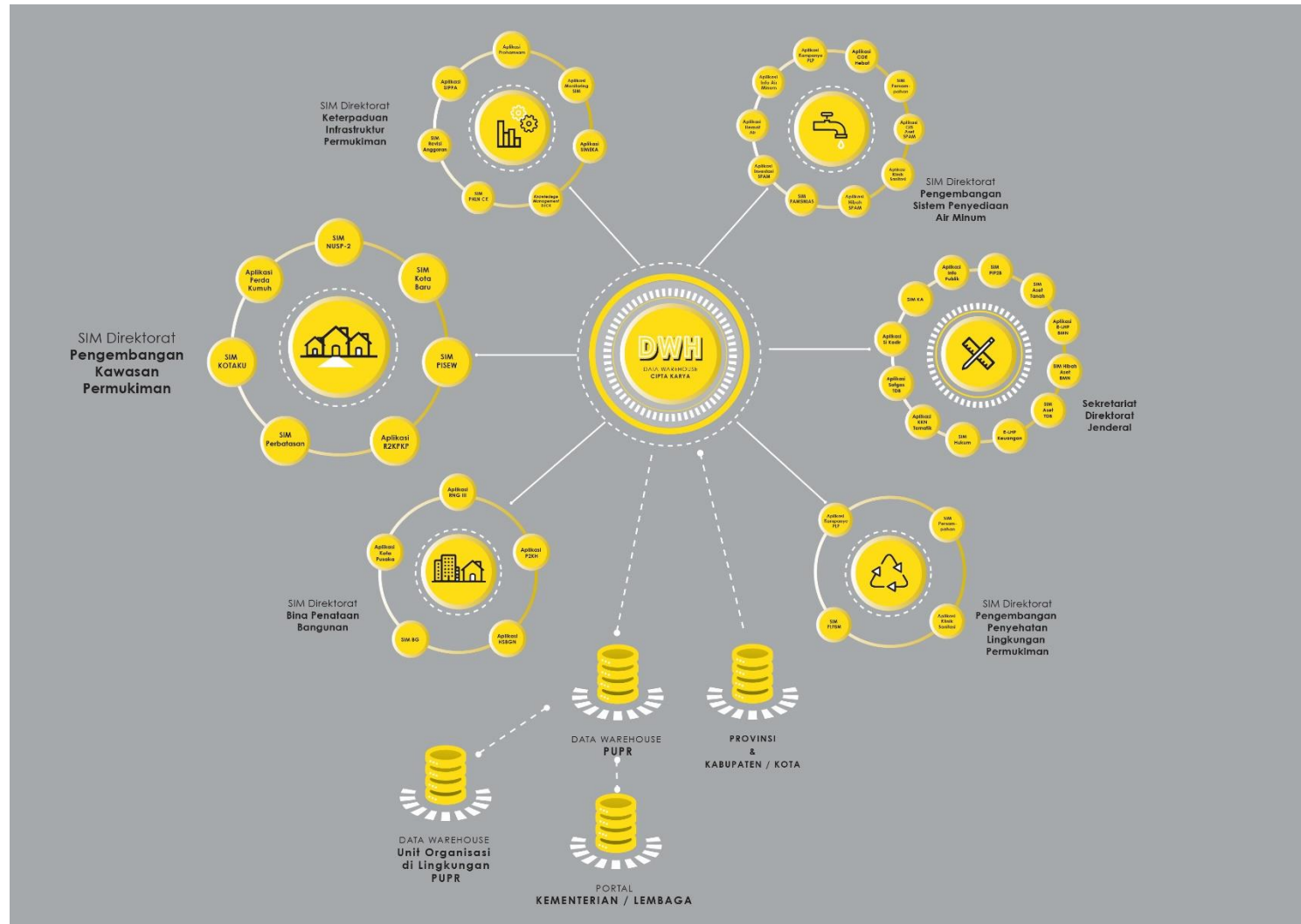
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

METADATA

- **Metadata** adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
- **Dokumen metadata** pada umumnya berisi tentang informasi yang menjelaskan tentang karakteristik suatu data.
- **Struktur metadata** yang baku menstandarkan apa saja item atau informasi tentang data yang harus tercakup dalam metadata.
- **Format metadata** yang baku menstandarkan spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

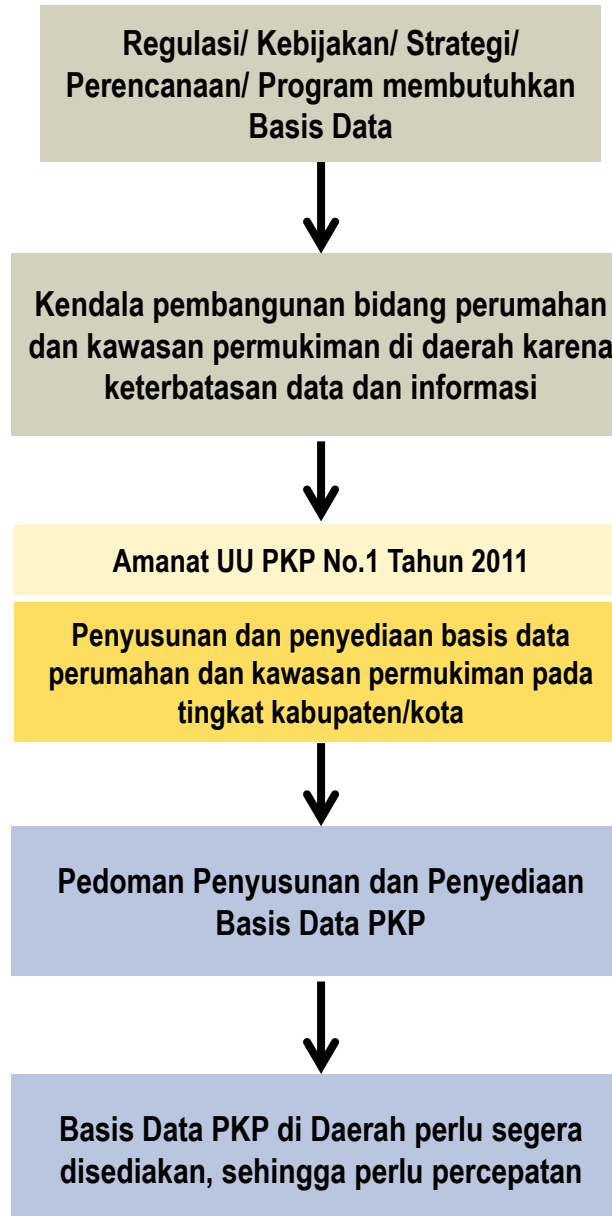
PERTUKARAN DATA , KODE REFERENSI YANG SAMA DAN PORTAL DATA (DATA WAREHOUSE)



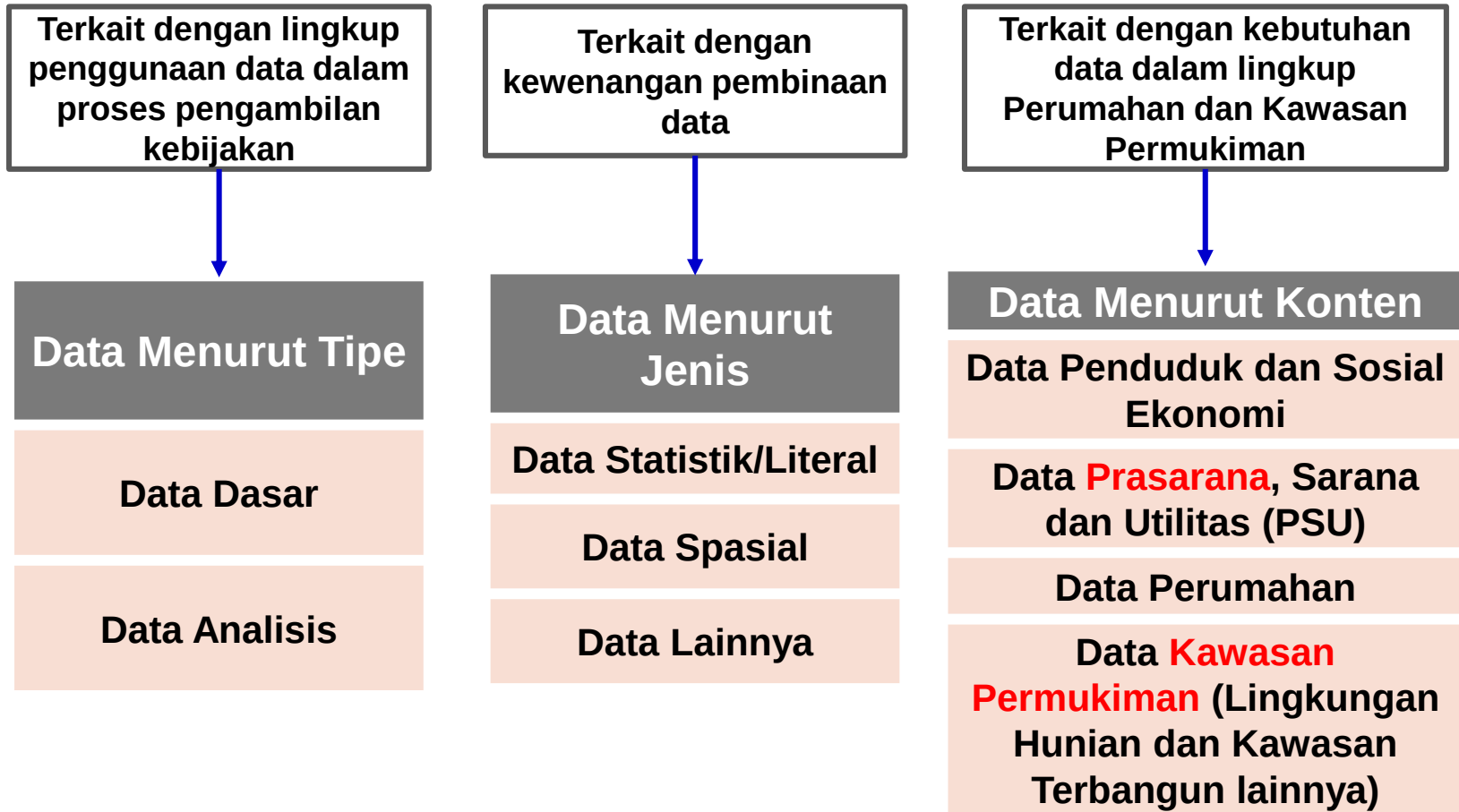
Manfaat DATA WAREHOUSE

1. Data Warehouse berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan
2. Data Warehouse hanya dapat menampilkan dan mengunduh data, namun tidak bisa melakukan perubahan terhadap data.

4. BASIS DATA KAWASAN PERMUKIMAN

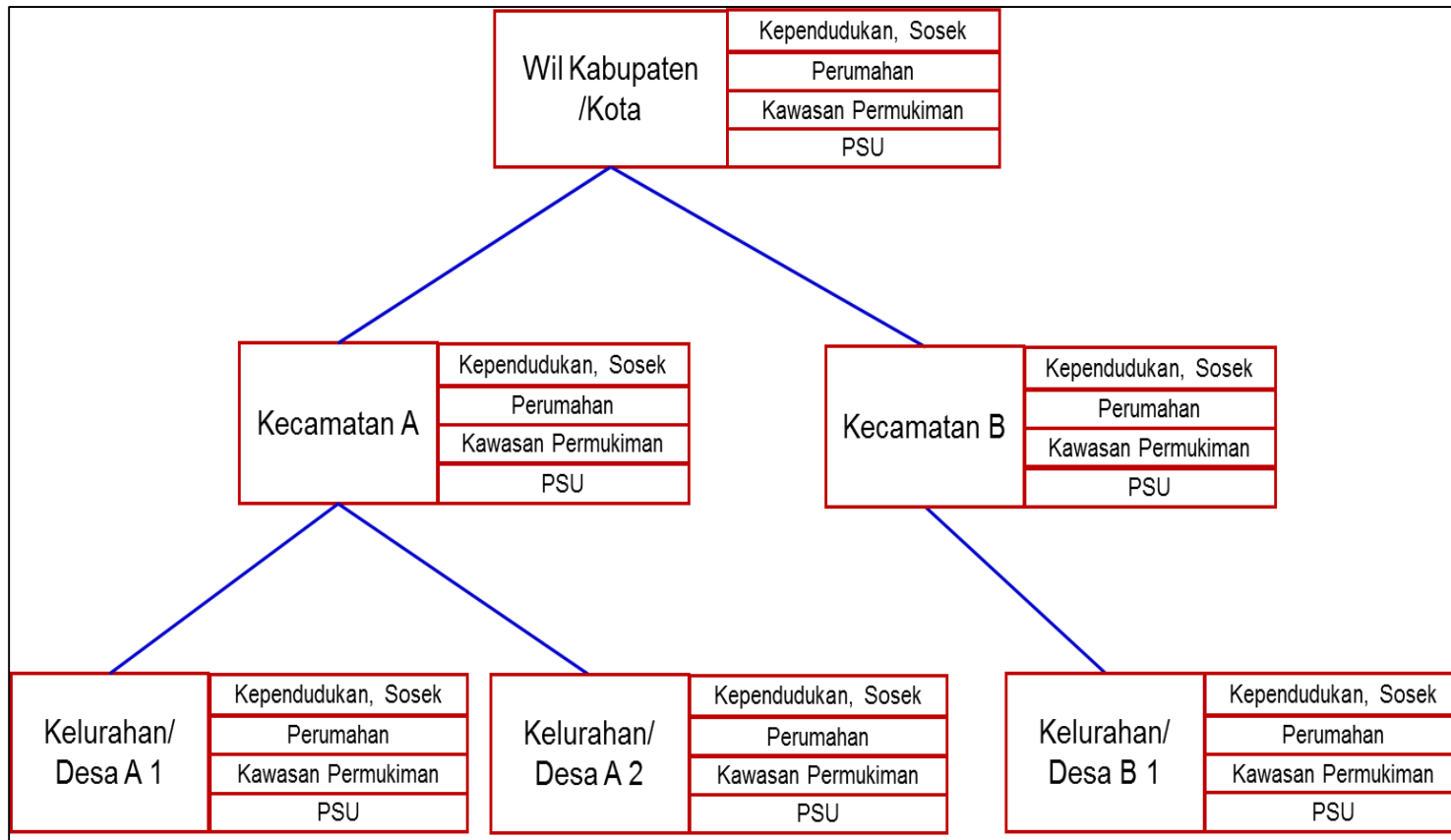


5. PENGELOMPOKAN BASIS DATA



Sejalan dengan Kebijakan Satu Peta, maka substansi data spasial harus memanfaatkan geospasial

6. STRUKTUR DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

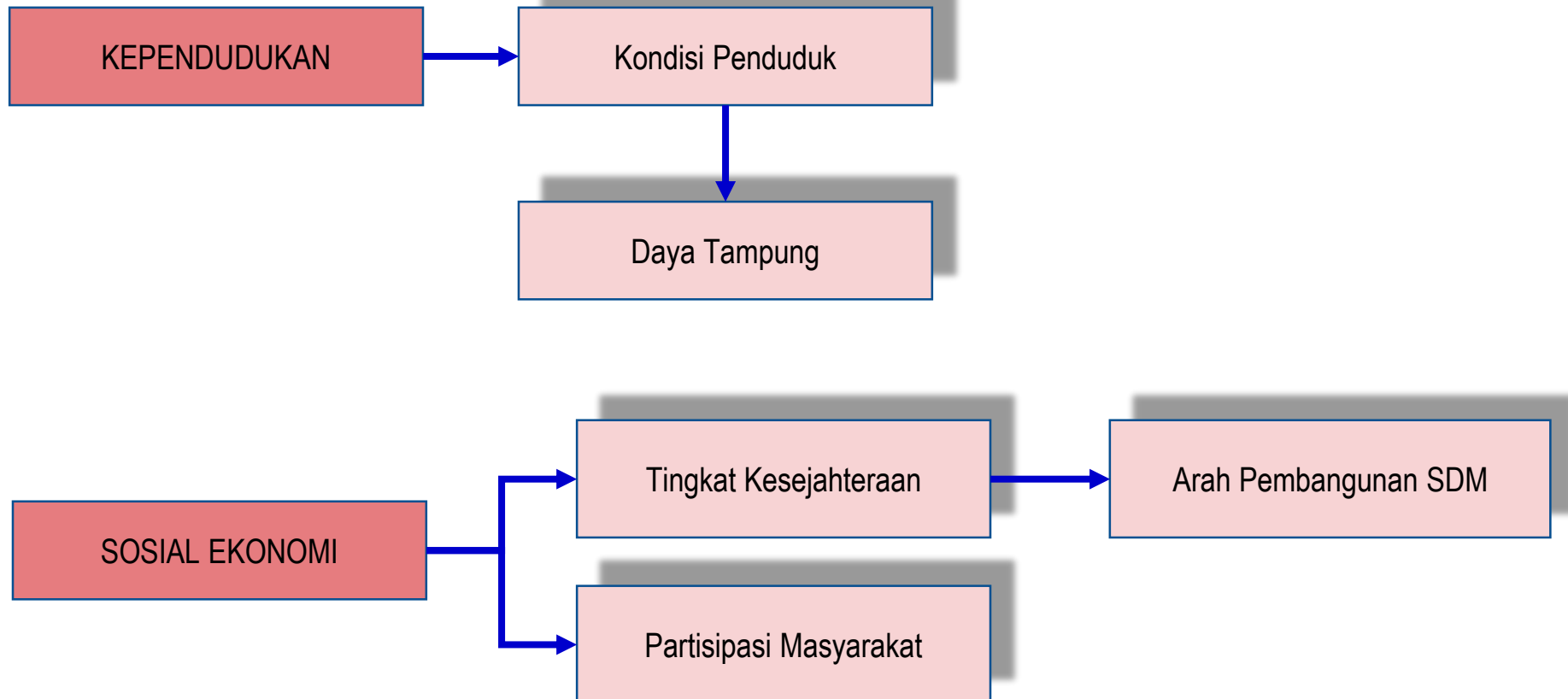


Terkait dengan konten data pada tiap entitas, maka terdapat sifat data yang harus diperhatikan, yaitu:

- bersifat tunggal di tiap entitas, yaitu data yang hanya ada pada satu entitas saja.
- bersifat penjumlahan data tiap entitas secara berjenjang, yaitu penjumlahan data pada entitas terkecil menjadi data pada entitas di atasnya.

7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

KONTEN DATA KEPENDUDUKAN-SOSIAL EKONOMI

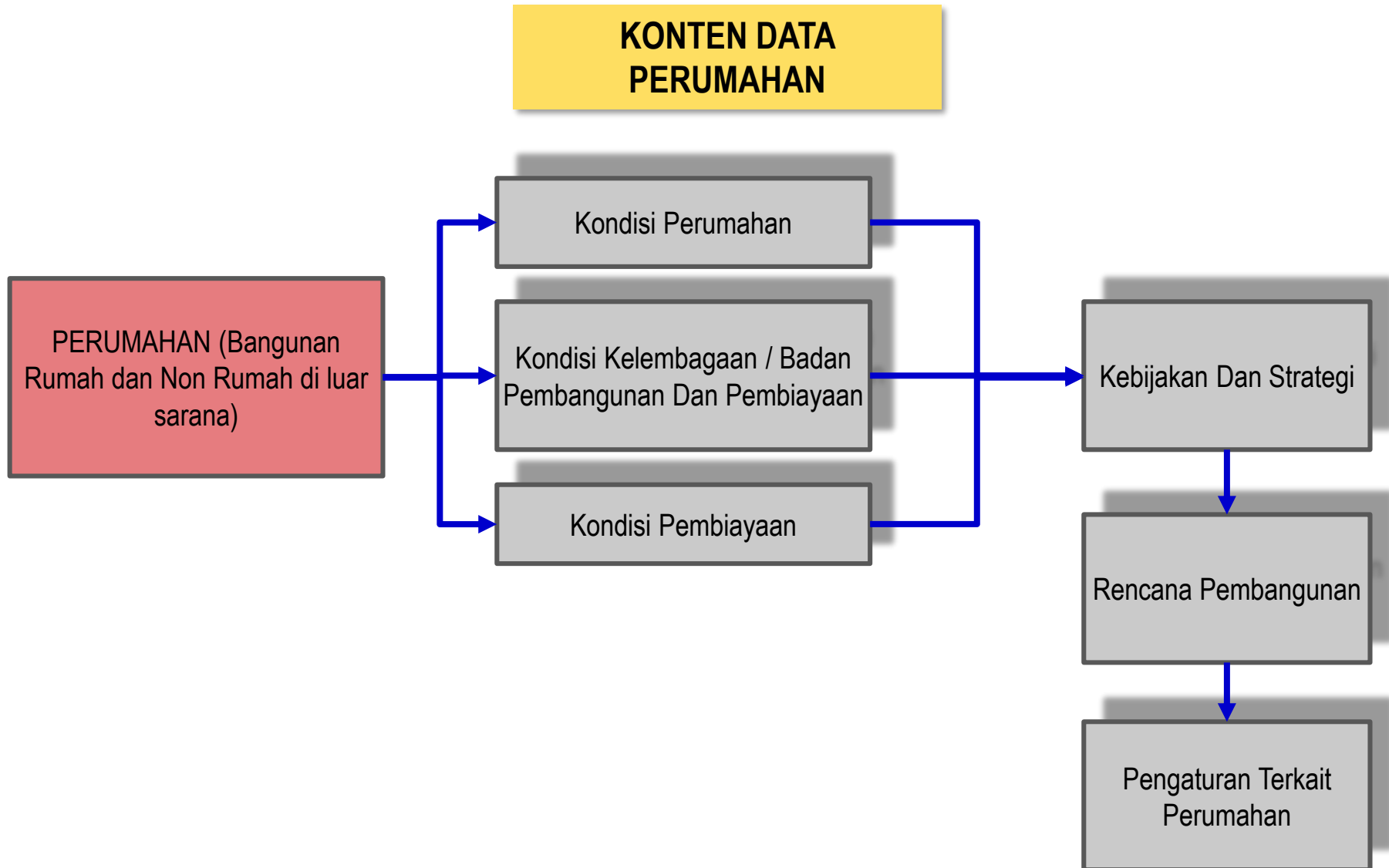


7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

Contoh Konten Data Minimal Kependudukan-Sosial Ekonomi

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
KEPENDUDUKAN-SOSIAL EKONOMI				
KEPENDUDUKAN				
	Jumlah penduduk			
	1	menurut jenis kelamin	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	2	menurut usia	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	3	menurut mata pencaharian	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil

7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN



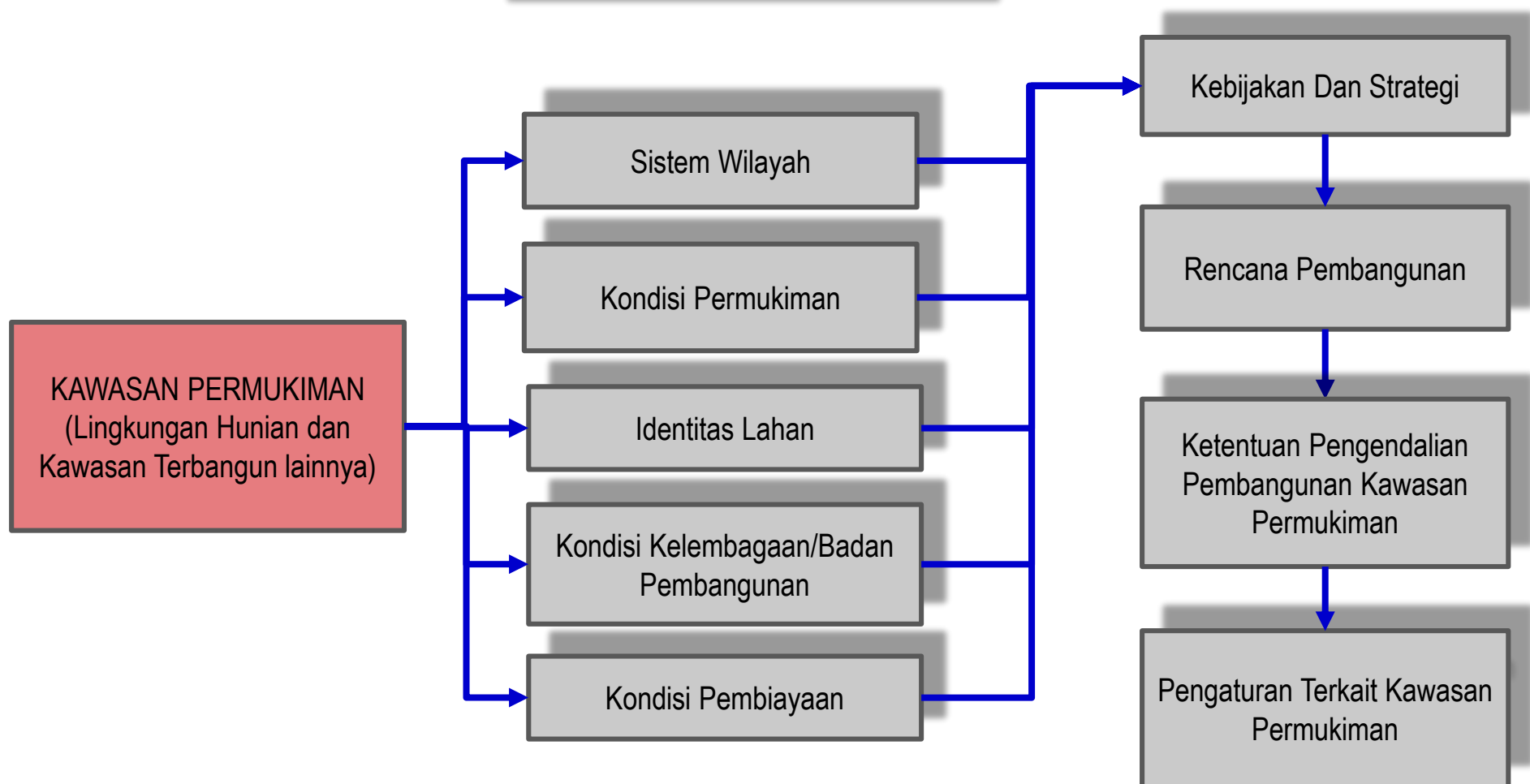
7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

Contoh Konten Data Minimal Perumahan

KONTEN DATA / DATA				ENTITAS			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
PERUMAHAN								
KONDISI PERUMAHAN								
	Jumlah rumah dalam permukiman							
	1	Menurut jenisnya						
		a	rumah komersial	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
		b	rumah umum	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
		c	rumah swadaya	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
		d	rumah khusus	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
		e	rumah negara	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	2	Menurut bentuknya						Hasil pendataan bangunan gedung
		a	rumah tunggal	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
		b	rumah deret	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
		c	rumah susun	√	√	√	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung

7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

KONTEN DATA KAWASAN PERMUKIMAN

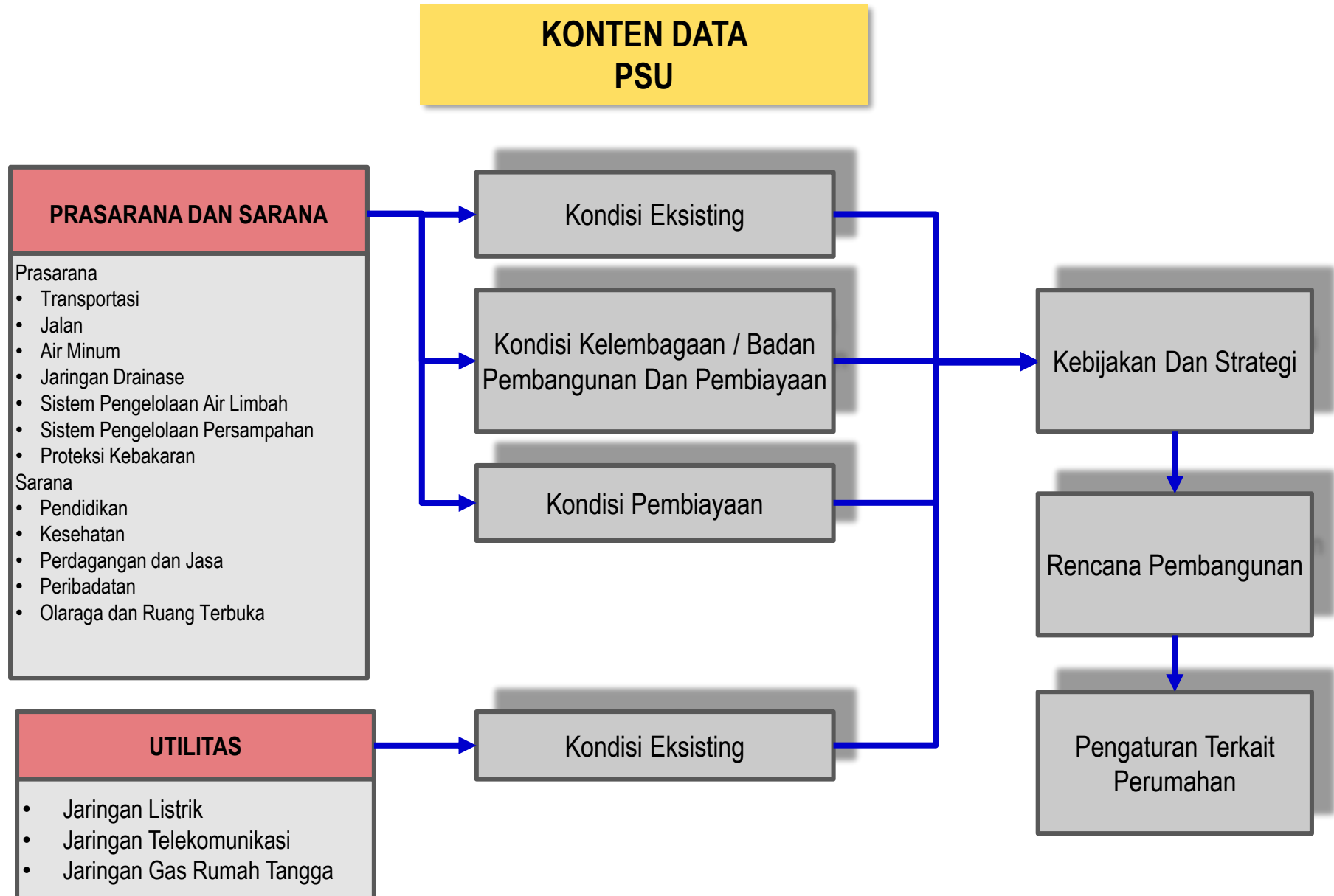


7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

Contoh Konten Data Minimal Kawasan Permukiman

KONTEN DATA / DATA			ENTITAS			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN	
ITEM	PENDETAILAN		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG		
KAWASAN PERMUKIMAN								
Sistem wilayah								
	Luas wilayah administrasi							
	Tutupan lahan							
	1	daerah pertanian						
		a	Luas sawah irigasi	√	√	√	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
		b	Luas sawah tadah hujan	√	√	√	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
		c	Luas sawah lebak	√	√	√	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
		d	Luas sawah pasang surut	√	√	√	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR

7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN



7. KONTEN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN

Contoh Konten Data Minimal PSU

KONTEN DATA / DATA				ENTITAS			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
PRASARANA SARANA UTILITAS								
KONDISI PRASARANA								
	Prasarana Transportasi							
	1	Transportasi Darat						
		a	Jumlah terminal penumpang tipe C	√	√	√	Perhubungan	Tatralok
		b	Jumlah halte	√	√	√	Perhubungan	Tatralok
		c	Panjang trayek angkutan umum	√	√	√	Perhubungan	Tatralok
			1) Trayek					
	2	Transportasi Udara						
		a	Jumlah bandara perintis	√	√	√	Perhubungan	Tatralok
	3	Transportasi Laut						
		a	Jumlah pelabuhan perintis	√	√	√	Perhubungan	Tatralok

8. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

- Instrumen Pengumpulan Data bidang infrastruktur permukiman adalah **acuan dalam penyediaan data dan pengembangan sistem informasi/aplikasi** sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan data tiap unit kerja.
- Instrumen Pengumpulan Data tersebut **termuat dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 21/SE/DC/2017** tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016-2019.



8. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

KABUPATEN/ KOTA

LAMPIRAN 2.1 FORM ISIAN DATA PKP KABUPATEN/KOTA

NAMA PROVINSI

NAMA KABUPATEN/KOTA

KONTEN DATA / DATA

NILAI

SATUAN /
UNIT

ITEM

PENDETAILAN

KEPENDUDUKAN-SOSIAL EKONOMI

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk

1 menurut jenis kelamin

a Laki-laki

b Perempuan

2 menurut usia

a 0 - 4

b 5 - 9

c 10 - 14

d 15 - 19

e 20 -24

f 25 - 29

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

8. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

KECAMATAN

LAMPIRAN 2.2 FORM ISIAN DATA PKP KECAMATAN			
NAMA PROVINSI			
NAMA KABUPATEN/KOTA			
NAMA KECAMATAN			
KONTEN DATA / DATA		NILAI	SATUAN / UNIT
ITEM	PENDETAILAN		
KEPENDUDUKAN-SOSIAL EKONOMI			
KEPENDUDUKAN			
Jumlah penduduk			
1	menurut jenis kelamin		
	a Laki-laki		Jiwa
	b Perempuan		Jiwa
2	menurut usia		
	a 0 - 4		Jiwa
	b 5 - 9		Jiwa
	c 10 - 14		Jiwa
	d 15 - 19		Jiwa
	e 20 -24		Jiwa

8. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

KELURAHAN/ DESA

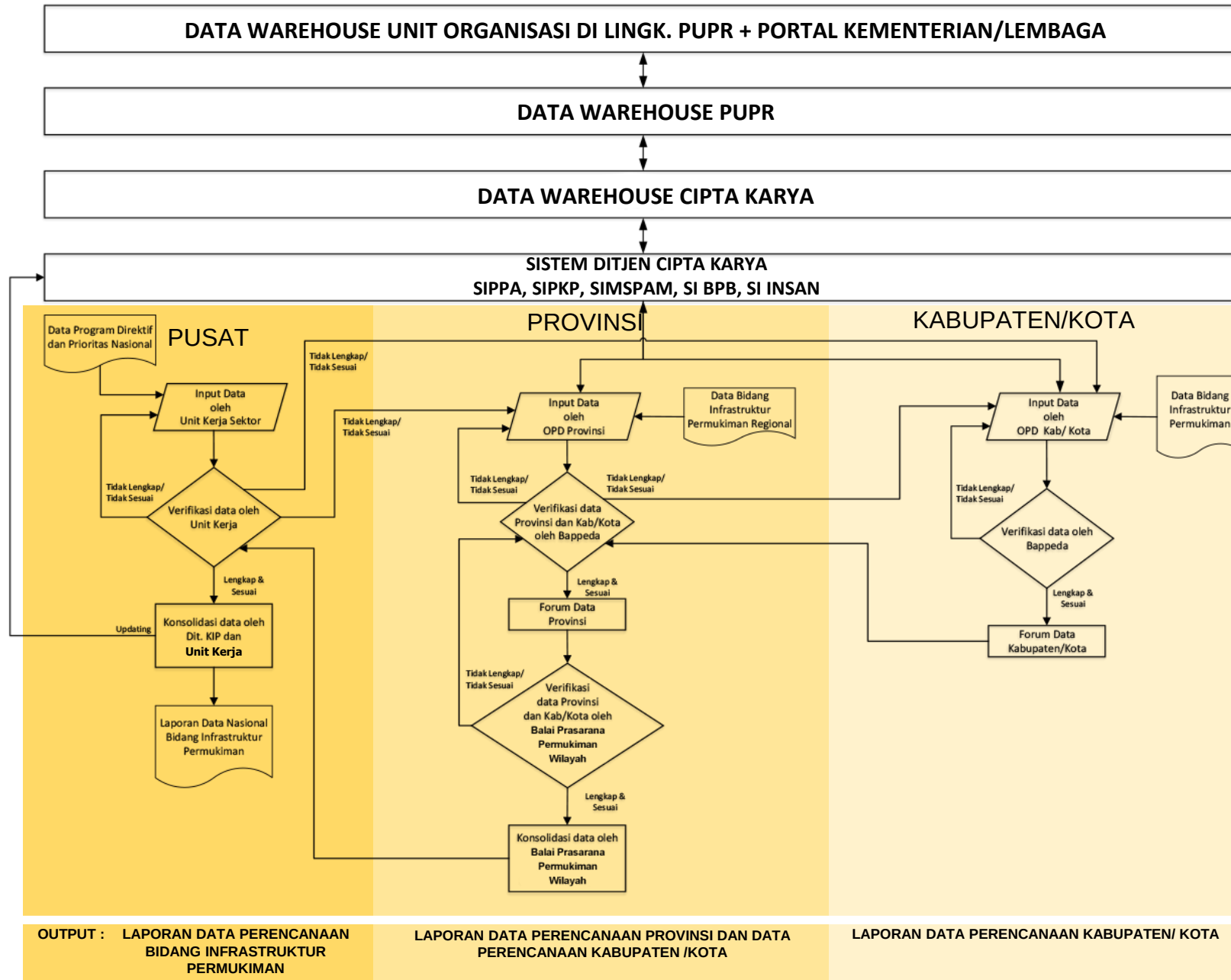
LAMPIRAN 2.3 FORM ISIAN DATA PKP KELURAHAN/DESA			
NAMA PROVINSI			
NAMA KABUPATEN/KOTA			
NAMA KECAMATAN			
NAMA KEL./DESA			
KONTEN DATA / DATA		NILAI	SATUAN / UNIT
ITEM	PENDETAILAN		
KEPENDUDUKAN-SOSIAL EKONOMI			
KEPENDUDUKAN			
Jumlah penduduk			
1	menurut jenis kelamin		
	a Laki-laki		Jiwa
	b Perempuan		Jiwa
2	menurut usia		
	a 0 - 4		Jiwa

9. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merujuk pada dokumen sektoral yang sudah dihasilkan oleh produsen data, dengan ketentuan:

- a. data dasar dan analisis harus menggunakan dokumen terbaru pada tahun pengumpulan data;
- b. data dasar literal/statistik, dikumpulkan langsung oleh produsen data sesuai dengan entitas datanya, melalui survei/sensus/dan lainnya;
- c. data rencana menggunakan dokumen yang sesuai ketentuan peraturan terkait dokumen, dengan umur dokumen tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan jika dokumen yang dirujuk sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka harus dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku;
- d. data spasial yang berupa area menggunakan Poligon dan yang berupa garis menggunakan polyline dengan Peta Dasar Skala 1: 25.000 untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sedangkan wilayah lainnya menggunakan Skala 1:50.000 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

10. ALUR PENGELOLAAN DATA MINIMAL KAWASAN PERMUKIMAN



11. SISTEM INFORMASI

PENYUSUNAN PEDOMAN TATAKELOLA TIK



PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 53/SE/DC/2016, turunan dari Permen PUPR No 17/PRT/M/2016 tentang petunjuk pelaksanaan TIK



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TIK DJCK 2016-2019

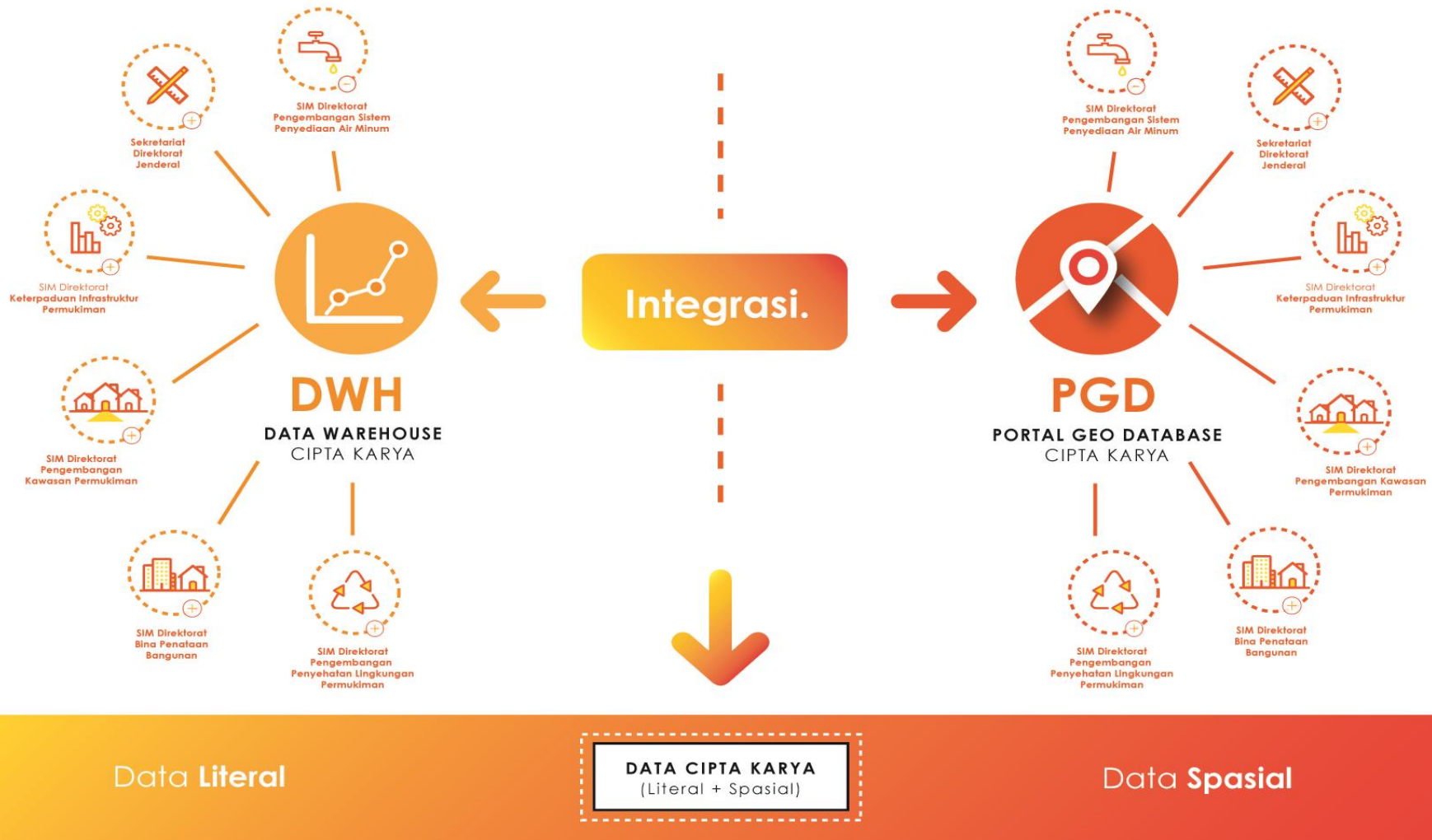


Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 21/SE/DC/2017, turunan dari Permen PUPR No. 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru TIK di Kementerian PUPR

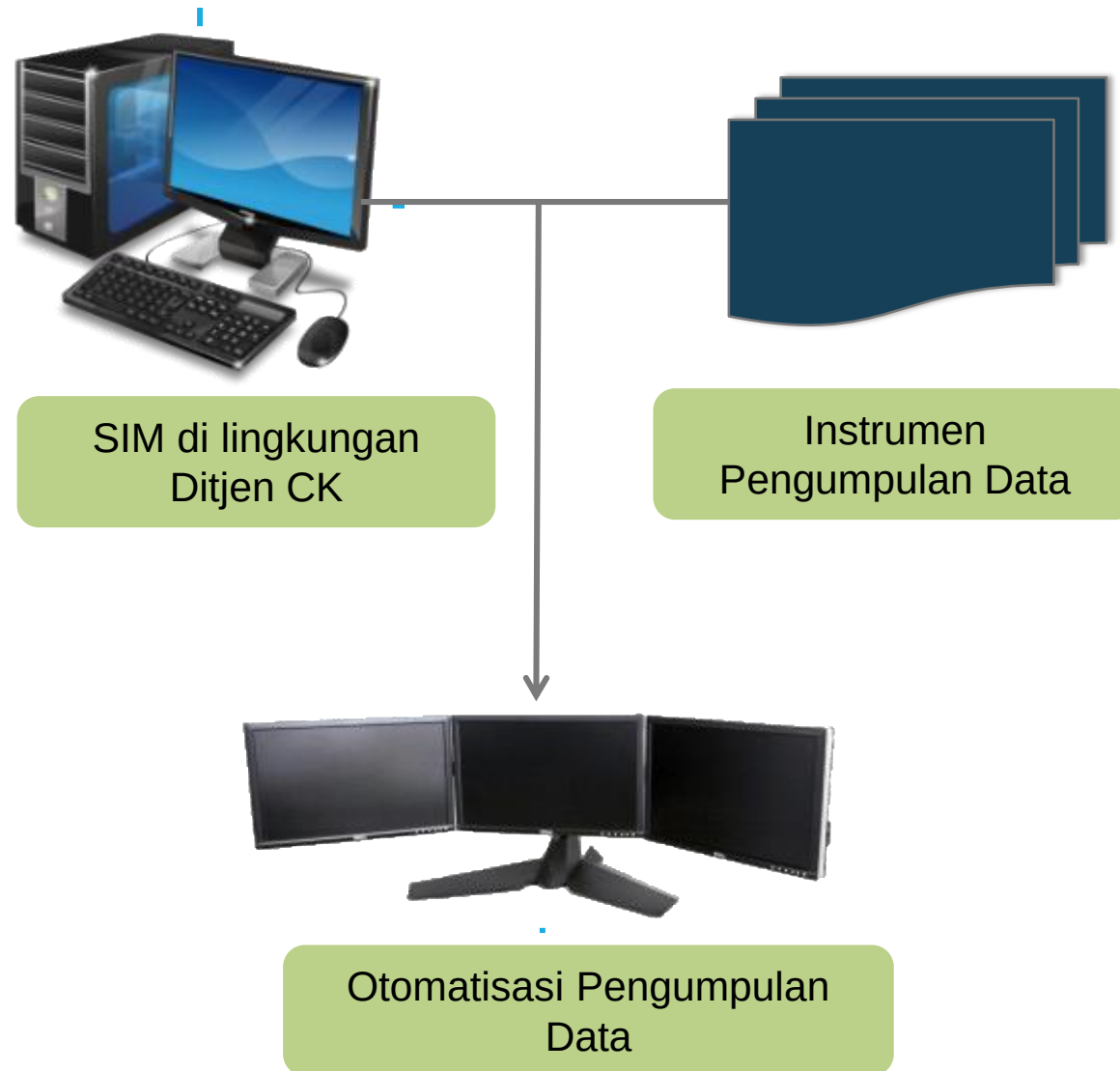
11. SISTEM INFORMASI

D. PORTAL DATA: DATA WAREHOUSE

Integrasi Data Literal dan Spasial Cipta Karya



12. SINKRONISASI INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DENGAN SISTEM INFORMASI



12. PENGUMPULAN DATA DENGAN SISTEM INFORMASI



PKP

Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman

Masuk

Belum memiliki akun ? [Buat Akun](#)

© 2019

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

12. PENGUMPULAN DATA DENGAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

subulussalam

Dashboard

Kawasan +

Forum Diskusi +

Semua Kawasan



0

Kawasan Perkotaan



0

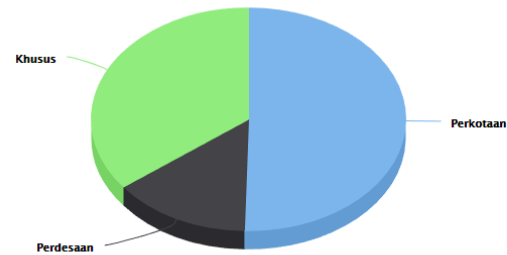
Kawasan Perdesaan



0

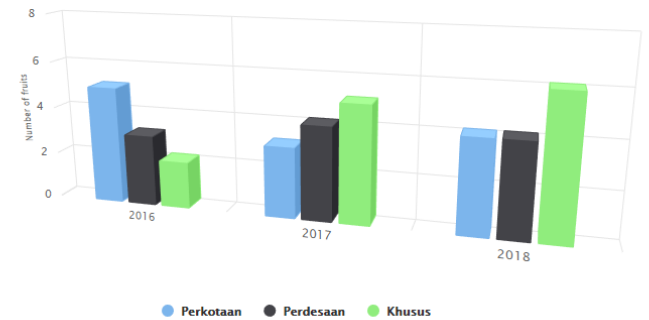
Kawasan Khusus

Diagram kalkulasi data semua kawasan per periode



Highcharts.com

Grafik kalkulasi data semua kawasan per periode



Highcharts.com

12. PENGUMPULAN DATA DENGAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

subulussalam

Dashboard

Kawasan +

Forum Diskusi +

Home / Umum / Edit

Umum

Profil

Provinsi ACEH

Kabupaten KOTA SUBULUSSALAM

Jumlah Kecamatan 5

Jumlah Kelurahan 82

Luas Wilayah 1391 Jiwa/Km² 0 Jiwa/Km²

Jumlah Penduduk

Tipe	Tahun	Jiwa	Aksi
Umum	2017	78725 Jiwa	+ -
Umum	2016	77084 Jiwa	+ -
Umum	2015	75188 Jiwa	+ -
Umum	2014	73708 Jiwa	+ -

Update Kembali

Jumlah KK 16856 KK

Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR 0 Jiwa

Jumlah KK Miskin 0 KK

Kepadatan Penduduk Rata-rata 57 Jiwa/Km²

Angka Pertambahan Penduduk Per Tahun 2

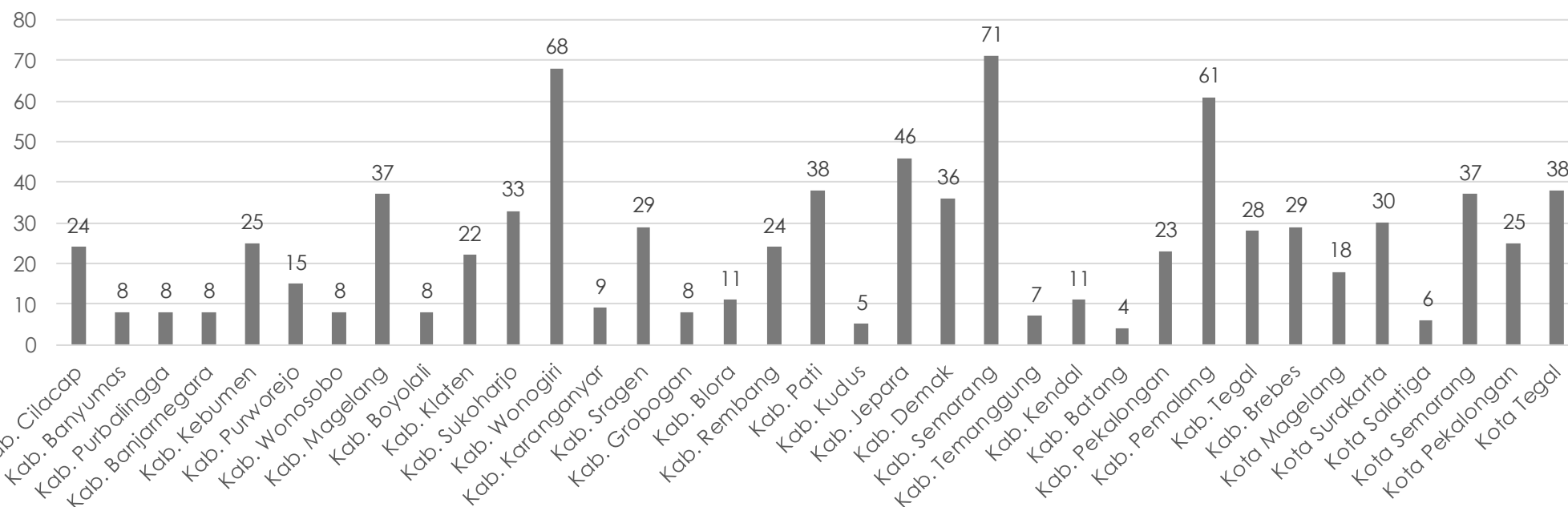
Jumlah Usia Produktif

Tipe	Tahun	Jiwa	Aksi
Umum	2017	6920 Jiwa	+ -
Umum	2016	6812 Jiwa	+ -
Umum	2015	6685 Jiwa	+ -
Umum	2014	6517 Jiwa	+ -

12. PENGUMPULAN DATA DENGAN SISTEM INFORMASI

1 Rekap Kabupaten/Kota - Keterisian Data pada aplikasi **SIPKP**

Status: 18 Desember 2018



2 Kab/Kota Paling Aktif dalam Pengisian Data pada **SIPKP**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Field Terisi
1	Kab. Semarang	71
2	Kab. Wonogiri	68
3	Kab. Pemalang	61
4	Kab. Jepara	46
= 5	Kab. Pati	38
= 5	Kota Tegal	38

Status: 18 Desember 2018

13. ARAHAN PENYUSUNAN BASIS DATA KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pembangunan basis data kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman merupakan **kerja bersama** dalam **mewujudkan kebijakan satu data** untuk menyediakan data yang bisa **dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan** dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.
2. Perlunya **peningkatan komitmen** dalam penyediaan data yang berkualitas oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dalam meningkatkan efektivitas pembangunan.
3. Perlunya **peningkatan koordinasi dan komunikasi** antar pemangku kepentingan dalam penyediaan dan pemanfaatan data kawasan permukiman.
4. Melakukan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam pengumpulan data untuk penyusunan basis data kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah.

TERIMA KASIH

